



## *Assistance for village owned enterprises through information technology-based institutions in Sandang Pangan Village, Buton Selatan Regency*

Nastia , L.M. Azhar Sa'ban, Muh. Rizal Ardiansyah Putra, Jumadil, Finangsih, Rezky Mahendra Alfayeed, Latif, La Gufran  
Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

 [nastia567@gmail.com](mailto:nastia567@gmail.com)

 <https://doi.org/10.31603/ce.8910>

### **Abstract**

*The purpose of this community service is to assist village owned enterprises (BUMDes) through two approaches, namely strengthening BUMDes institutions based on collaboration and increasing the competence of BUMDes resources with entrepreneurial innovation. The method used in this community service activity is carried out in three stages, namely observation, workshop, and mentoring. Through this PKM, BUMDes Lamando Jaya was able to formulate a potential map and create a business plan document that can be applied to BUMDes' governance. BUMDes administrators are able to bridge community programs as a village government agenda. Also through this program, BUMDes managers can optimize social media as a means of tourism and business promotion through educating content creation and photography techniques.*

**Keywords:** *Village owned enterprises; Institutional strengthening; Information technology*

## **Pendampingan badan usaha milik desa melalui penguatan kelembagaan berbasis teknologi informasi di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan**

### **Abstrak**

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini untuk melakukan pendampingan BUMDes melalui dua pendekatan, yakni penguatan kelembagaan BUMDes berbasis kolaborasi dan peningkatan kompetensi sumber daya BUMDes dengan inovasi kewirausahaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu observasi, workshop, dan pendampingan. Melalui kegiatan PKM ini, BUMDes Lamando Jaya mampu merumuskan peta potensi dan menciptakan dokumen *business plan* yang dapat diterapkan bagi tata kelola BUMDes Lamando Jaya. Pengurus BUMDes mampu menjembatani program komunitas masyarakat sebagai agenda pemerintah desa. Melalui kegiatan ini juga, pengelola BUMDes dapat membuat mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi pariwisata dan bisnis melalui edukasi pembuatan konten dan teknik fotografi.

**Kata Kunci:** Badan usaha milik desa; Penguatan kelembagaan; Teknologi informasi

## **1. Pendahuluan**

Desa telah mempunyai kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam isi peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan bahwa desa memiliki wewenang yang termasuk di dalamnya urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa dalam upaya peningkatan perekonomian desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Pradini, 2020).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014).

Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Diperlukan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan (Nursetiawan, 2018) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar et al., 2021). Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Raharjo & Wirawan, 2023).

Disisi lain, tata kelola bisnis yang belum optimal menjadi faktor lambanya perkembangan BUMDes dalam menunjang perekonomian desa. Penganggaran pendirian BUMDes serta modalnya yang sepenuhnya bersumber dari pembiayaan dan kekayaan desa (Dana Desa), belum dapat dimanfaatkan untuk menjalankan roda perekonomian desa (Saputra et al., 2020). Penggunaan dana desa yang masih dipahami untuk membangun infrastruktur fisik, bukan untuk pengembangan bisnis desa melalui BUMDes. Untuk itu perlu adanya pendekatan pemberdayaan sumberdaya manusia di desa untuk dapat mengelola BUMDes untuk dapat memberikan keuntungan secara ekonomis maupun sosial bagi desa (Adawiyah, 2018).

Sebagaimana amanat Permendesa No. 4 Tahun 2015, menyatakan bahwa BUMDes didirikan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa, termasuk meningkatkan pendapatan asli desa (Pramita, 2018). Pendirian BUMDes juga didasari oleh potensi desa, kapasitas dan SDM di desa serta inisiatif pemerintah desa (Endah, 2018). Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, adalah salah satu desa yang memiliki kompleksitas potensi yang perlu dikelola melalui pendekatan BUMDes yang optimal dan saling menguntungkan. Desa Sandang Pangan, setidaknya memiliki 3 (tiga) potensi yang dapat saling terhubung untuk dapat mendukung perekonomian desa yang menyejahterakan, yakni potensi hasil perkebunan (utamanya kopi, dan kambewe), potensi budaya (budaya maataa tahunan) serta potensi wisata alam (Bukit Lamando,

Air Terjun Amajapo). Masing-masing potensi tersebut jika dikelola berbasis komunitas dan *networking* diprediksi akan mampu memberikan daya dongkrak bagi perekonomian desa. Hanya saja pendekatan yang dilakukan mesti disesuaikan dengan basis potensi dan masalah yang melingkupi aktivitas tata kelola potensinya tersebut hingga saat ini.

Di sisi lain, potensi alam idealnya dapat mendukung perekonomian desa. Misalnya saja pesona Air Terjun Amajapo tidak saja menjadi objek wisata, namun juga airnya telah menyuplai air minum, listrik dalam bentuk PLTMH. Sejak bulan Agustus 2020, pemerintah desa telah meluncurkan paket wisata desa Sandang Pangan kepada wisatawan. Hanya saja belum berjalan begitu efektif disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat khususnya wisatawan untuk mengunjungi desa Sandang Pangan. Sedangkan perputaran ekonomi di luar itu terjadi pada aktivitas wisata yang masuk ke Desa Sandang Pangan, dimana objek wisata padang rumput Bukit Rongi yang cukup populer sebagai tempat wisata hiking, camping dan menikmati senja oleh masyarakat luas. Selain itu, komoditas kopi menjadi andalan desa Sandang Pangan.

Dengan ragam potensi tersebut, tentunya desa sandang pangan memiliki prospek ekonomi desa yang potensial jika mampu dikelola dengan baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sandang Pangan yang bernama Lamando Jaya saat ini hanya ditujukan bagi pengembangan Kopi Rongi saja, melalui penyertaan modal dana desa sebesar Rp. 275 Juta dengan sumber daya 200 orang petani kopi. Sedangkan keterkaitannya dengan potensi lainnya belum dikelola dengan optimal sehingga belum mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi desa.

Desa Sandang Pangan atau masyarakat lokal menyebutnya Rongi, memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi roda perekonomian desa. Namun, dalam tata kelolanya belum saling mendukung sebagai sebuah ekosistem ekonomi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Lamando Jaya, belum optimal memanfaatkan jejaring sumber daya lokal melalui kelompok pemuda dan mahasiswa desa. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada sejumlah pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, isu yang relevan dengan program pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi BUMDES Lamando Jaya Desa Sandang Pangan masih berorientasi pada satu potensi desa yakni Kopi Rongi.
- b. Rencana penyediaan paket wisata Desa Sandang Pangan belum memiliki *Business plan* yang dapat mendukung tata kelola kewirausahaan desa.
- c. Kelembagaan Masyarakat Desa di luar struktur Pemerintah Desa masih dikelola dengan pendekatan program kerja himpunan mahasiswa, namun belum menjadi program berkala dan berlanjut yang menjadi agenda pemerintah desa.
- d. Pendekatan promosi pariwisata yang dilakukan oleh BUMDES maupun kelompok pemuda belum menjangkau publik yang lebih luas. Selain itu konten dan *broadcast* sosialisasi paket wisata desa Sandang Pangan belum dikelola secara profesional dan populer.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan keberadaan BUMDes Lamando Jaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes, keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan BUMDes, dan menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat desa. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan BUMDes melalui dua pendekatan, yakni penguatan

kelembagaan BUMDES berbasis kolaborasi dan peningkatan kompetensi sumber daya BUMDES dengan inovasi kewirausahaan. Pendekatan ini dipilih berdasarkan potensi desa, sumber daya lokal, kebijakan pemerintah desa dan giat pemuda lokal dalam mempromosikan desa sandang pangan. Hal ini dinilai mampu memberikan konsep pengembangan potensi desa melalui tata kelola BUMDES yang partisipatif.

## 2. Metode

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sandang Pangan, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Peserta dalam pengabdian ini adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa Sandang Pangan, pengelola BUMDes, Karangtaruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Metode yang digunakan merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Workshop (penyuluhan) dan pelatihan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini pada 22 Februari 2023. Tahapan pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini disusun melalui penjadwalan yang disesuaikan dengan relevansi masing-masing tahap terhadap solusi yang ditawarkan (Tabel 1).

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pendekatan yang dilakukan
1.	Kegiatan 1: Observasi Potensi dan Seminar Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memetakan jenis usaha ekonomi desa berbasis potensi;</li> <li>Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola usaha;</li> <li>Membuat <i>Business Plan Model</i></li> </ol>	<i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i>
2.	Kegiatan 2: Workshop Tata Kelola Kelembagaan BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi masalah tata kelola BUMDES;</li> <li>Pengklasifikasian partisipasi komunitas dalam tata kelola BUMDES;</li> <li>Pembentukan dan Legalisasi Kelembagaan Masyarakat;</li> <li>Agenda program kerja untuk perumusan RPJPDes/RPJMDes.</li> </ol>	<i>Workshop, FDG dan Dinamika Kelompok</i>
3.	Kegiatan 3: Pendampingan Kewirausahaan Desa berbasis BUMDES	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kompetensi Wirausaha masyarakat;</li> <li>Membentuk dan membangun jejaring (<i>networking</i>) usaha dengan dunia industri.</li> </ol>	Pendampingan oleh kelompok pemuda desa dan mahasiswa desa

## 3. Hasil dan Pembahasan

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan bersama Mitra yakni Pemerintah Desa Sandang Pangan, Kelompok Pemuda, Kelompok Usaha, dan HIPERMAR. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap observasi potensi dan seminar desa, workshop Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dan pendampingan kewirausahaan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut.

### 3.1. Observasi potensi dan seminar desa

Tim PKM melakukan observasi potensi yang dimiliki desa Sandang Pangan dan Seminar Desa untuk memetakan jenis usaha ekonomi desa berbasis potensi; menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola jenis usaha ekonomi; dan membuat *business plan model* untuk dijalankan. Pada tahap ini juga tim PKM mengidentifikasi bahan-bahan kebutuhan kegiatan dan koordinasi penyusunan rencana kerja PKM (Gambar 1).



Gambar 1. Koordinasi tim PKM dengan kepala desa beserta aparat

### 3.2. Workshop penguatan BUMDes

Tim PKM dan Pemerintah Desa; Pengelola BUMDES; Kelompok Pemuda; Kelompok Usaha; HIPERMAR bersepakat melaksanakan workshop pada hari Sabtu, 22 Februari 2023 (Gambar 2) sebagai tindak lanjut hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. Dalam pengabdian ini akan menawarkan solusi permasalahan melalui pendekatan metode *participatory rural appraisal* (PRA) dengan memperhatikan keahlian tim PKM dan Mitra kerja sama dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat dirumuskan peta potensi dan sebaran sumber daya yang dapat saling menunjang dalam menciptakan ekosistem kolaboratif antar *stakeholder* desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan adanya dokumen *business plan model* yang dapat diterapkan bagi tata kelola BUMDES Lamando Jaya.



Gambar 2. Penyampaian materi tata kelola BUMDes

Penguatan kelembagaan BUMDes dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan mengenai pemetaan (*mapping*), penilaian (*assessment*) dan kategorisasi BUMDes sesuai potensi desa. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan maka pendampingan BUMDes untuk fase baru atau mulai tepat dilakukan di BUMDes yang mangkrak yang fokus pada pemetaan potensi desa dan pemilihan usaha yang tepat. Fase menengah berkaitan dengan pendampingan dalam hal strategi dan manajemen

untuk BUMDes yang sudah jalan tetapi belum ada keuntungan. Jika BUMDes sudah jalan dan ingin menjadi maju maka pendampingan berkaitan dengan pengembangan usaha yang sebaiknya dilakukan. Pendampingan yang tepat dengan kondisi BUMDes akan menjadi daya ungkit (*leverage*) yang luar biasa dalam memajukan BUMDes sesuai tahapan/fase masing-masing BUMDes.

Penggalian potensi desa ini dimaksudkan agar BUMDes di Desa Sandang Pangan mengetahui kira-kira peluang usaha apa yang menjadi unggulan dari desa. Membantu pengurus BUMDes terkait tata kelola BUMDES yang partisipatif memerlukan kolaborasi antar *stakeholder*, diperlukan pendekatan penguatan kelembagaan pemuda, mahasiswa dan masyarakat secara umum. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui penguatan kelembagaan, melalui *workshop*, FDG dan Dinamika Kelompok. Hal ini diharapkan guna dapat menjembatani program komunitas masyarakat sebagai agenda pemerintah desa sandang pangan. Dengan begitu, pembiayaan hingga kebijakan komunitas masuk dalam agenda kebijakan desa sandang pangan (RPJPDDes/RPJMDDes).

Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, diharapkan Desa Sandang Pangan terciptanya peningkatan efektivitas peran dan fungsi organisasi, peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar, dan peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDes. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan implementasi teknologi informasi menjadi kebutuhan yang penting untuk saat ini.

### 3.3. Pendampingan kewirausahaan

Tim PKM mendampingi Kewirausahaan Desa berbasis BUMDes untuk penguatan kompetensi wirausaha masyarakat; serta membentuk dan membangun jejaring (*networking*) usaha dengan dunia industri. Dalam pendampingan kewirausahaan, para peserta dianjurkan untuk melakukan kegiatan promosi di platform digital, disamping para pengelola BUMDes juga melakukan kegiatan komunikasi pemasaran secara offline (**Gambar 3**). Pengelola bekerja sama dengan Dinas Pariwisata atau lembaga lainnya dalam melakukan kegiatan pameran, baik yang berskala nasional maupun internasional. Selain itu, media iklan konvensional pun digunakan yaitu dengan mencetak brosur, poster, banner dan juga booklet. Hari ini, pemanfaatan media sosial dalam kegiatan komunikasi pemasaran merupakan pilihan yang tepat dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Hal tersebut dikarenakan media sosial sudah menjadi media yang populer di berbagai kelompok usia.



Gambar 3. Penyampaian materi promosi menggunakan teknologi informasi

Pemberdayaan BUMDes berkaitan dengan revitalisasi yang bisa dilakukan melalui peningkatan akses agar produk dan pemasaran lebih baik lagi. Teknik yang bisa dilakukan melalui digital marketing, integrasi rantai pasok, dan kemitraan strategis. Pengenalan sosial media untuk marketing produk BUMDes mulai dilakukan. Strategi biaya juga mulai diterapkan melalui upaya-upaya untuk menurunkan biaya produksi dengan melakukan integrasi rantai pemasok. Untuk mendukung perluasan pasar produk, maka kemitraan dan kolaborasi secara strategis dengan BUMDes lain atau pihak lainnya sangat penting dilakukan. Peningkatan akuntabilitas adalah tahap pemberdayaan selanjutnya yang dapat dilakukan melalui aplikasi akuntansi dan keuangan sampai dengan pelaporan dengan menggunakan software untuk mempercepat proses pelaporan. Melalui pelaporan keuangan secara cepat dan valid diharapkan dapat membantu BUMDes dalam mengambil keputusan secara strategis dan relevan dengan kebutuhan BUMDes. Pemberdayaan yang optimum adalah pada saat produk BUMDes bisa dikembangkan secara khusus dan intensif melalui pendampingan dari *crowd funding* atau dari lembaga yang kredibel untuk mendorong kemajuan BUMDes.

Pada tahap ini, pengelola BUMDes; kelompok pemuda; kelompok usaha; dan HIPERMAR diberikan juga pemahaman untuk mempromosikan pariwisata maupun hasil kekayaan desa yang dapat dijadikan olahan khas desa seperti kopi rongi. Selain itu, para peserta diberikan penguatan terkait konten dan *broadcast* sosialisasi paket wisata dan olahan khas desa Sandang Pangan. Pada tahap akhir, diberikan pembelajaran *photography* agar mampu menghasilkan gambar yang baik untuk mempromosikan pariwisata maupun hasil kekayaan desa lainnya yang dijadikan olahan khas desa (Gambar 4). Dunia fotografi memiliki kontribusi yang sangat penting untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan yang dimiliki Desa Sandang Pangan kepada masyarakat luas. Dengan visual yang dihasilkan sebuah kamera dan dipadukan dengan teknik pengambilan yang tepat, hal itu bisa menjadi jurus promosi paling ampuh. Karena melalui foto itulah orang akan mengenal dan mulai tertarik dengan apa yang ingin kita pasarkan.



Gambar 4. Pelatihan *photography*

## 4. Kesimpulan

Melalui pelatihan kepada mitra dalam membangun gagasan melalui partisipasi masyarakat, maka dapat dirumuskan peta potensi dan sebaran sumberdaya yang dapat saling menunjang dalam menciptakan ekosistem kolaboratif antar *stakeholder* desa. Dengan pendekatan ini, menghasilkan dokumen *bussines plan model* yang dapat

diterapkan bagi tata kelola BUMDES Lamando Jaya. Pada akhir kegiatan, pengurus BUMDes telah memahami dan mampu menjalankan tata kelola BUMDES yang berkelanjutan. Selain itu, pengurus BUMDes mampu membuat email usaha, media sosial usaha, memiliki keterampilan teknik fotografi bagi produk usaha desa yang dapat digunakan sebagai alat dalam pemasaran digital.

## Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3), 1-15.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1), 1-14.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4(4), 25-33.
- Iskandar, J., Engkus, Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1-11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.
- Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(1), 57-67. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.1000>
- Pramita, Y. D. (2018). The Analysis of Understanding Permendes no . 4 Year 2015 and Use of Information Systems on BUMDes Management Accountability. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1-8.
- Raharjo, T., & Wirawan, A. (2023). Preparation of legal instruments for Village Owned Enterprises Mitra Cibogo Sejahtera. *Community Empowerment*, 8(5), 558-563. <https://doi.org/10.31603/ce.7896>
- Saputra, B., Fajri, H., & Nurhabibi, P. (2020). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 743-753. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4507>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License